

MENGEKSPLORASI TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI PKH INKLUSIF UNTUK LANSIA DISABILITAS DI KABUPATEN GRESIK

Eka Cemara Zevira¹, Vidya Imanuari Pertiwi²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur^{1,2}

Email: ekacemarazevira@gmail.com^{1*}, vidya.imanuari.adneg@upnjatim.ac.id²

Abstract

This research aims to find out how inclusive PKH is implemented to overcome poverty, especially for the elderly and disabled in Gresik Regency. Are the programs and outputs produced in accordance with what was expected? This research uses a qualitative research type that uses descriptive analysis. The focus of this research is to analyze how inclusive PKH is implemented in Gresik Regency using analysis based on David J Korten's implementation concept with a focus on three elements, namely the program, implementing organization and target group. The data collection techniques that researchers will use in this research are interviews, documentation and observation. The results of this research show that the Gresik Regency Inclusive Family Hope Program (PKH) has been implemented quite well and the output produced has also been right on target, namely elderly people over 60 years and people with disabilities who are registered with the DTKS. The benefits of Inclusive PKH are felt by the people of Gresik Regency. The organization and actors in charge also carried out their duties very well, although there were still data problems during distribution, namely KPMs who had died and moved house without updating the data in DTKS.

Keywords: *Inclusive PKH, Gresik, Implementation, Social assistance, Elderly.*

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dalam PKH Inklusif untuk mengatasi kemiskinan khususnya pada lansia, disabilitas di Kabupaten Gresik. Apakah program dan output yang dihasilkan telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian kualitatif yang menggunakan analisa bersifat deskriptif. Fokus dalam penelitian ini yakni untuk menganalisis bagaimana implementasi PKH Inklusif di Kabupaten Gresik dengan menggunakan analisis yang didasarkan pada konsep implementasi David J Korten dengan fokus tiga elemen yakni program, organisasi pelaksana serta kelompok sasaran. Adapun teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif Kabupaten Gresik terlaksana dengan cukup baik dan Output yang dihasilkan juga telah tepat sasaran yakni lansia diatas 60 tahun dan disabilitas yang terdaftar pada DTKS. Manfaat PKH Inklusif sangat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Gresik. Organisasi dan aktor yang bertugas juga menjalankan tugas dengan sangat baik,

walaupun masih terdapat kendala data pada saat penyaluran yakni KPM yang telah meninggal dunia dan pindah rumah tanpa melakukan pembaruan data di DTKS.

Kata kunci: PKHInklusif, Gresik, Implementasi, Bansos, Lansia.

PENDAHULUAN

Dunia saat ini sedang menghadapi suatu permasalahan salah satunya adalah kemiskinan (Susanti et al., 2023). Kemiskinan merupakan topik yang diperdebatkan pada berbagai forum dunia, baik nasional maupun internasional (Melis, 2019), walaupun permasalahan kemiskinan telah ada sejak ratusan tahun lalu, namun fakta yang ada menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan dapat dikatakan belum efektif untuk menekan peningkatan jumlah penduduk miskin dalam suatu wilayah (Yusnafira et al., 2023).

Menurut The World Bank (Bank Dunia) tercatat dalam Laporan Poverty and Shared Prosperity, pada tahun 2020 sebanyak 88 juta sampai 115 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem. Walaupun terdapat perbedaan tingkat serta jumlah penduduk miskin di setiap negara, namun tidak satupun negara yang bisa terbebas dari jerat kemiskinan, bahkan negara kaya yang maju dibidang sains serta industri pun mengalami kemiskinan walaupun tidak dalam jumlah yang besar.

Kemiskinan adalah suatu masalah yang dihadapi oleh berbagai negara, bahkan di negara berkembang seperti Negara Indonesia (Abdul Aziz et al., 2016). Kemiskinan dapat ditandai dengan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, salah satunya yakni makanan, pakaian, tempat berlindung, kesehatan serta pendidikan. Hal ini disebabkan oleh langkanya alat pemenuhan kebutuhan dasar, serta pendidikan dan pekerjaan yang sulit.

Permasalahan mengenai kemiskinan berkaitan dengan aspek khusus di bidang pendidikan. Pendidikan rendah kerap dianggap sebagai awal atau akar dari terjadinya kemiskinan (Ramly & Syaban, 2022). Pendidikan merupakan proses mempengaruhi anak atau individu untuk dapat menepatkan diri dengan lingkungan sekitar serta dapat menimbulkan perubahan yang baik pada diri sendiri maupun pada

lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya bagi seluruh masyarakat (Fikar & Suriaman, 2022).

Penekanan angka kemiskinan menjadi prioritas utama dari pemerintah untuk dapat memenuhi target pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terdapat beberapa landasan hukum yang mengatur agar angka kemiskinan di Indonesia tidak meningkat, yakni UU Nomor 13 Tahun 2011, Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1981, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1981, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010.

Terdapat upaya dari pemerintah untuk menekan angka kemiskinan yang telah tercantum dalam Rencana. Pembangunan Jangka Panjang (RPJP-Nas) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Menurut hal tersebut, setiap negara bagian yaitu kabupaten/kota memiliki wewenang untuk dapat mengentas kemiskinan di daerahnya.

Terdapat beberapa program bantuan yang telah dijalankan oleh pemerintah untuk menekan angka kemiskinan yang semakin tinggi di Negara Indonesia yakni Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Program keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program tersebut dijalankan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Percepatan Dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Program untuk mengentas kemiskinan telah dijalankan di berbagai daerah salah satunya yakni Jawa Timur. Menurut Badan

Pusat Statistik Jatim, Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan penduduk miskin yang tercatat sebanyak 4.572 jiwa pada tahun 2021, dengan presentase :



Grafik 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Jawa Timur Pada Tahun 2021

(Sumber: *Badan Pusat Statistik Jawa Timur*)

Dari **grafik 1**, terlihat bahwa Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten yang memiliki penduduk miskin yang masih tergolong tinggi pada tahun 2021. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Gresik semakin gencar melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di wilayahnya. Salah satu program yang dijalankan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif yang dibentuk pada tahun 2022.

Program PKH Inklusif merupakan hasil dari Nawakarsa atau dapat juga disebut dengan 9 navigasi perubahan yang menjadi strategi membangun Kabupaten Gresik Baru guna mendukung realisasi visi dan misi dari Bupati serta Wakil Bupati Kabupaten Gresik yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Gresik.

Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif merupakan program pemberian bantuan kepada Lansia serta Penyandang Disabilitas dengan syarat yang harus dipenuhi. Program ini merupakan suatu terobosan kreasi dan inovasi murni dari Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam Nawa Karsa Bupati dan Wakil Bupati

Gresik yaitu Gresik Seger (Sejahtera, Bahagia, dan Bredikari).

Target dari program PKH Inklusif adalah masyarakat yang rentan seperti lansia dan disabilitas yang telah masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetapi belum pernah menerima bantuan apapun selama satu tahun. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif yang akan diberikan berbentuk uang tunai sebesar 2 juta dengan pembagian penyaluran selama 4 kali dalam satu tahun.

Program PKH Inklusif dibentuk karena adanya temuan dari keresahan masyarakat Gresik saat Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan wakilnya turun ke lapangan untuk bertemu masyarakat. Gus Yani mengatakan bahwa ia mendapati temuan bahwa terdapat masyarakat penyandang disabilitas yang belum menerima bantuan apapun dari sejak lahir hingga saat ini telah berusia 25 tahun (Mustain, 2022). Dari temuan tersebut, Gus Yani ini serta Wakil Bupati Ibu Aminatun Habibah memiliki komitmen untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, dan PKH Inklusif merupakan bentuk nyata jawaban permasalahan tersebut.

Pada tahun 2022, sebanyak 2.450 masyarakat dapat menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif ini, dengan penerima bantuan 500 KPM disabilitas dan 1.950 KPM lansia. Total anggaran yang disediakan oleh Kabupaten Gresik untuk program PKH Inklusif yaitu sebesar 4.9 Miliar (Setiono, 2022).

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi PKH Inklusif untuk mengatasi kemiskinan khususnya pada lansia, disabilitas di Kabupaten Gresik, apakah program dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Serta menganalisis faktor kendala yang dihadapi oleh pihak terkait dalam pelaksanaan program PKH Inklusif.

Peneliti mengangkat topik PKH Inklusif di Kabupaten Gresik karena belum ada penelitian terdahulu yang mengangkat mengenai topik tersebut. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pemerintah pusat/daerah sebagai rujukan guna memberdayakan seluruh masyarakat serta memberikan sedikit informasi bagi

pembaca dan penulis untuk inspirasi dan dapat dikembangkan dalam topik lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji kualitas suatu hubungan, aktivitas, atau situasi dan menekankan pada gambaran keseluruhan yang langsung menggambarkan aktivitas dan situasi yang ada secara rinci. (Fadli, 2021).

Alasan menggunakan metode kualitatif deskriptif yakni sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif serta mendalami bagaimana implemementasi PKH Inklusif untuk lansia, disabilitas di Kabupaten Gresik. Penelitian ini juga menggunakan analisis yang didasarkan pada konsep Implementasi Kebijakan Publik menurut David J Korten dengan tiga elemen fokus penelitian yakni :

1. Program, yakni terdapat kecocokan antara yang ditawarkan program dengan sesuatu yang memang diperlukan oleh sasaran
2. Organisasi Pelaksana, yakni terdapat kecocokan prosedur yang diberikan oleh program tersebut dengan kemampuan organisasi yang melaksanakan.
3. Kelompok Sasaran, yakni terdapat kecocokan syarat yang telah ditetapkan oleh organisasi agar dapat memperoleh hasil program juga dengan apa yang bisa dilakukan oleh sasaran.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data yaitu teknik wawancara, dokumentasi serta observasi, lalu diikuti oleh teknik penarikan informasi berdasarkan konsep *snowball sampling* dan *purposive sampling*.

Snowball sampling merupakan metode dalam memperoleh sumber data yang pada mulanya berjumlah sedikit lalu akan membesar karena sumber data tersebut belum dapat memberikan data yang memuaskan, maka peneliti mencari informan lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. (Sugiyono, 2017: 218-219).

Teknik penarikan informasi berdasarkan konsep *snowball sampling* pada penelitian ini digunakan untuk mempertimbangkan kemungkinan yang akan dihadapi pada proses penelitian, seperti data yang didapatkan belum dapat memenuhi kapasitas.

Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sebuah teknik pengambilan sumber data penelitian yang dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan dari salah satu petugas Dinas Sosial Kabupaten Gresik untuk menggali data.

Informan merupakan salah satu staff Dinas Sosial Kabupaten Gresik yang bertugas mengelola data penerima bantuan PKH Inklusif di Kabupaten Gresik, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengamati objek dan situasi yang diteliti.

Informan bertugas melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat yang akan menerima bantuan Program Keluarga Harapan (Inklusif) di Kabupaten Gresik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi adalah sebuah proses untuk mendapatkan sumber daya tambahan agar dapat digunakan untuk menghitung apa yang akan dikerjakan. Implementasi kebijakan lebih menegaskan pada tindakan yang telah dilakukan oleh kelompok atau individu maupun pemerintah yang ditujukan agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya (Fahturrahman, 2016).

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Fahturrahman (2016) implementasi memiliki makna yakni memahami apa yang nyata setelah program tersebut berlaku atau telah dirumuskan. Hal ini mencakup usaha untuk menimbulkan dampak nyata kepada masyarakat. Usaha tersebut melibatkan perilaku badan administrasi yang bertanggungjawab melaksanakan program dan mempengaruhi semua kelompok yang terlibat dan akhirnya akan berdampak, baik seperti yang diharapkan (*intended*) atau seperti yang tidak diharapkan (*unintended*) dari program tersebut (Fahturrahman, 2016). Agar implementasi kebijakan publik dapat

mencapai apa yang diharapkan, maka implementasi tersebut harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut karena implementasi kebijakan publik merupakan studi kebijakan publik bersifat krusial.

Suatu kebijakan harus dipersiapkan serta direncanakan dengan sangat baik pada implementasinya, jika tidak maka apa yang sudah menjadi tujuan dari kebijakan publik tersebut tidak akan dapat terwujud. Oleh sebab itu, tidak hanya pada tahapan implementasi saja yang harus dipersiapkan dengan baik dalam implementasi kebijakan publik, namun juga harus mengantisipasi pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan publik agar dapat diimplementasikan (Fahturrahman, 2016).

Penelitian ini mengacu pada fokus penelitian menurut David J Korten, yakni mengenai faktor yang bisa mempengaruhi suatu keberhasilan dalam sebuah implementasi program yang terbagi menjadi tiga elemen dan dapat disebut juga dengan model kesesuaian. Elemen-elemen tersebut memiliki keterkaitan satu sama lainnya, sehingga jika terdapat elemen yang berjalan tidak optimal, maka hal tersebut dapat mempengaruhi elemen lainnya.

Program

Elemen ini berperan sebagai kecocokan antara yang ditawarkan oleh program tersebut dengan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh sasaran.

1. Adanya Kejelasan Antara Program Dengan Masyarakat Penerima Manfaat

Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif harus ada kesesuaian antara program bantuan PKH Inklusif dengan masyarakat Gresik selaku penerima bantuan. Kejelasan PKH Inklusif disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik melalui kegiatan sosialisasi dan melakukan penyebaran informasi penjelasan serta alur data PKH Inklusif melalui akun instagram resmi Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

Kegiatan sosialisasi mengenai PKH Inklusif diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik dengan mengundang perwakilan dari setiap kecamatan di Kabupaten Gresik.

Selanjutnya pihak kecamatan akan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak desa, dan pihak desa akan mengadakan rapat dengan warga wilayahnya mengenai PKH Inklusif.

Dalam akun Instagram resmi milik Dinas Sosial Kabupaten Gresik terdapat alur data PKH Inklusif, yaitu :

- a) Dinas Sosial
 - Melakukan penentuan kuota usulan dan penerima;
 - Menyampaikan kriteria;
 - Membuat format pengusulan;
 - Membuat format Surat Keterangan.
- b) Desa / Kelurahan
 - Pemenuhan kuota usulan (dari SIKS.NG);
 - Mengusulkan melalui link.
- c) Dinas Sosial
 - Melakukan rekap data usulan dari desa / kelurahan.
- d) Pendamping PKH
 - Melakukan verifikasi data.
- e) Desa / Kelurahan
 - Membuat surat Keterangan hasil verifikasi usulan.
- f) Pendamping PKH
 - Mengumpulkan surat keterangan desa.
- g) Dinas Sosial
 - Melakukan pengajuan SK Penerima.

Kegiatan sosialisasi serta penyebaran informasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik dapat dikatakan efektif dan informasi mengenai PKH Inklusif telah tersalur dengan baik. Hal tersebut terbukti setelah dilakukan sosialisasi, sampai saat ini dinas sosial belum menemukan adanya keluhan dari masyarakat atau pihak desa karena tidak mengetahui mengenai informasi bantuan sosial PKH Inklusif.

2. Kesesuaian Program Dengan yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat.

Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif merupakan program orisinil yang dibuat oleh Kabupaten Gresik untuk meringankan beban masyarakat gresik

dan merupakan bentuk perluasan bantuan sosial di wilayah Gresik guna menurunkan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Gresik.

Adanya Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif menjadi salah satu jawaban atas permasalahan dan keresahan yang ada di masyarakat. PKH Inklusif adalah program yang diluncurkan oleh Bupati Gresik karena adanya temuan mengenai penyandang disabilitas yang belum menerima bantuan dari pemerintah sejak ia lahir hingga saat ini telah berusia 25 tahun.

Adanya program ini telah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat Gresik. Menurut Bupati Gresik Gus Yani penyaluran bantuan PKH Inklusif bertujuan untuk meringankan beban serta memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Gresik yang membutuhkan (Mustain, 2022).

Menurut Sunarmi sebagai salah satu masyarakat penerima bantuan program PKH Inklusif, ia sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Gresik yang telah peduli dan memperhatikan warga miskin. Menurutnya program PKH Inklusif sangat membantu karena dapat meringankan beban hidup masyarakat miskin (Ismanto, 2023).

Organisasi Pelaksana

Dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif, terdapat organisasi yang melaksanakan program tersebut sesuai dengan kebijakan yang ada dan adanya kecocokan program tersebut dengan organisasi yang menjalankan, yakni adanya kecocokan tugas yang diberikan oleh program dengan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi yang melaksanakan dengan adanya tim pelaksana dan prosedur pelaksana.

1. Kemampuan Organisasi Dalam

Melaksanakan Program PKH Inklusif

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif terdapat beberapa Organisasi atau aktor yang berperan penting dalam menjalankan alur pelaksanaan agar Program Keluarga

Harapan (PKH) Inklusif Kabupaten Gresik berjalan sesuai tujuan yang telah ditentukan sejak awal. Organisasi atau aktor tersebut memiliki tugas masing-masing yang mengharuskan organisasi atau aktor tersebut mampu dan memahami prosedur pendaftaran serta alur seleksi yang ditentukan.

a) Dinas Sosial Kabupaten Gresik Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif, Dinas Sosial Kabupaten Gresik memiliki tugas penting, yakni :

- Melakukan penentuan kuota usulan dan penerima;
- Menyampaikan kriteria;
- Membuat format pengusulan;
- Membuat format Surat Keterangan;
- Melakukan rekap data usulan dari desa / kelurahan;
- Melakukan pengajuan SK Penerima.

b) Pihak Kecamatan / Desa Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif, kecamatan atau desa memiliki tugas, yakni

- Pemenuhan kuota usulan (dari SIKS.NG);
- Mengusulkan melalui link;
- Membuat Surat Keterangan Hasil Verifikasi Usulan.

c) Pendamping PKH Inklusif Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif, Pendamping PKH Inklusif memiliki tugas, yakni :

- Melakukan verifikasi data;
- Mengumpulkan Surat Keterangan Desa.

Dinas Sosial akan melakukan penentuan kuota atau jumlah untuk penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif melalui jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Dinas Sosial juga memberikan format Surat Keterangan yang nantinya akan diisi oleh pihak desa atau kelurahan dengan data masyarakat yang dirasa telah memenuhi kriteria penerima bantuan PKH Inklusif.

Organisasi atau aktor yang terlibat dalam proses pelaksanaan PKH Inklusif telah memahami sepenuhnya tugas masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan implementasi PKH Inklusif yang berjalan dengan lancar mulai dari pengumpulan data, verifikasi serta penyaluran.

Kelompok Sasaran

Menurut David J Korten, ketika melaksanakan suatu program, harus ada kesesuaian antara kondisi yang ditetapkan organisasi untuk mencapai hasil program dan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran.

1. Adanya Kejelasan Persyaratan yang Harus Dilengkapi

Sebagaimana program bantuan sosial lainnya di Indonesia yang memiliki persyaratan atau berkas yang harus dilengkapi oleh calon penerima manfaat, PKH Inklusif juga memiliki beberapa persyaratan yang wajib dilengkapi oleh pemerintah desa/kelurahan sebagai syarat pengajuan warganya untuk menjadi calon penerima manfaat PKH Inklusif antara lain :

- 1) Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan;
- 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan;
- 3) Surat Keterangan dari Desa.

Dokumen yang wajib dilengkapi telah tercantum dalam alur PKH Inklusif dan juga telah dipaparkan dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik kepada pihak desa/kecamatan.

2. Adanya Ketepatan Dalam Pelaksanaan

Dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif Kabupaten Gresik, terdapat mekanisme dalam pencairan PKH Inklusif dengan pembagian tugas yang dilakukan oleh beberapa organisasi yang terkait dalam program tersebut.

Pada tahap pertama Dinas Sosial bertugas untuk menyiapkan data penerima, data salur, sarpras serta juknis penyaluran. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan tempat pelaksanaan

penyaluran dan Pendamping PKH bertugas untuk mengondisikan masyarakat penerima manfaat. Adapun lembaga keuangan penyalur yang bertugas untuk melakukan pencairan dana.

Pada saat proses penyaluran berlangsung dinas sosial bertugas untuk melakukan pemantauan penyaluran yang dilakukan oleh bank penyalur serta mendampingi Bupati/Wakil Bupati dalam melakukan monitoring saat penyaluran bantuan PKH Inklusif berlangsung.

Setelah proses penyaluran bantuan PKH Inklusif selesai Pendamping PKH akan melakukan rekonsiliasi data penyalur dengan Bank penyalur dan dinas sosial. Selanjutnya dinas sosial akan melakukan pengembalian dana penyalur kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan membuat berita acara penyaluran.

Dalam proses persiapan penyaluran sampai penyaluran selesai terdapat ketepatan dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh Organisasi terkait yakni dinas sosial, pendamping PKH Inklusif, Bank penyalur dan pihak kecamatan.

3. Adanya Ketepatan Dalam Sasaran

Dalam Peraturan Bupati Gresik No. 47 Tahun 2022 mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif untuk masyarakat lansia dan disabilitas di Kabupaten Gresik, pada Pasal 5 dijelaskan mengenai kriteria yang harus dipenuhi penerima manfaat bantuan, yaitu :

- a) Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- b) Lansia (diatas 60 tahun) dan penyandang disabilitas yang belum pernah menerima bantuan sosial apapun;
- c) Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

Penyandang disabilitas yang dimaksud dalam kriteria penerima bantuan terdiri atas :

- a) Masyarakat penyandang disabilitas fisik.
- b) Masyarakat penyandang disabilitas intelektual.
- c) Masyarakat penyandang disabilitas mental.
- d) Masyarakat penyandang disabilitas sensorik.

Dalam realisasinya, program PKH Inklusif di Kabupaten Gresik telah tepat sasaran karena penerima bantuan atau penerima manfaat sejak tahun 2022-2023 merupakan lansia dan penyandang disabilitas. Namun terdapat beberapa kendala pada saat program PKH Inklusif berjalan.

Pada tahun 2023 kuota bantuan PKH Inklusif sejumlah 1.400 penerima, namun bantuan PKH Inklusif yang tersalur hanya sejumlah 1.113 penerima. Hal ini disebabkan oleh banyaknya penerima manfaat yang telah meninggal dunia namun belum terhapus dari DTKS karena pihak desa/kelurahan belum melakukan pembaruan data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Adapun kendala lain yaitu adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang pindah rumah namun belum melakukan update data alamat terbaru serta tidak hadir ketika penyaluran berlangsung.

Bantuan sosial yang diberikan melalui PKH Inklusif tidak dapat digantikan atau diwakilkan oleh siapapun dan dengan alasan apapun walaupun KPM telah meninggal dunia. Jika Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak hadir pada saat penyaluran bantuan maka pendamping PKH dan pihak bank penyalur akan melakukan homevisit ke rumah penerima manfaat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan Dalam implementasinya mekanisme pelaksanaan PKH Inklusif telah berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan, namun terdapat kendala dalam pelaksanaan PKH Inklusif di Tahun 2023. Karena kuota penerima belum terpenuhi yakni dari kuota 1.400 hanya tersaring 1.113 penerima saja. Hal ini disebabkan oleh banyaknya KPM yang

meninggal namun belum terhapus dari DTKS dan KPM pindah tempat tinggal.

Dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif di Kabupaten Gresik telah terealisasi dan terlaksana dengan cukup baik. Dalam aspek program, yakni adanya kecocokan antara apa yang telah ditawarkan oleh program tersebut dengan apa yang memang dibutuhkan oleh sasaran. Dinas Sosial Kabupaten Gresik melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi melalui akun instagram Dinas Sosial mengenai PKH Inklusif agar masyarakat dapat memahami apa itu PKH Inklusif serta bagaimana alur pelaksanaannya. Program PKH Inklusif juga ditujukan hanya untuk lansia diatas 60 tahun dan disabilitas yang belum menerima bantuan apapun serta terdaftar dalam DTKS. Program ini sangat bermanfaat karena dapat mengurangi beban dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Gresik.

Dalam aspek organisasi pelaksana, yakni adanya kecocokan antara tugas yang diberikan oleh program dengan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi pelaksana dengan adanya tim pelaksana dan prosedur pelaksana, PKH Inklusif memiliki beberapa organisasi yang mendukung berjalannya program tersebut yakni dinas sosial, desa/kecamatan dan pendamping PKH. Organisasi atau aktor tersebut memiliki tugas-tugas yang harus dijalankan dan dipahami dengan baik agar implementasi PKH Inklusif dapat berjalan dan tersalur dengan lancar.

Dalam aspek Kelompok sasaran, yakni terdapat kesesuaian antara kondisi yang ditentukan oleh organisasi di mana hasil program dapat dicapai dan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program, PKH Inklusif memiliki persyaratan yang harus dilengkapi agar data dapat tervalidasi seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Desa.

Dalam implementasinya mekanisme pelaksanaan PKH Inklusif telah berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan, namun terdapat kendala dalam pelaksanaan PKH Inklusif di Tahun 2023. Karena kuota penerima belum terpenuhi yakni dari kuota

1.400 hanya tersaring 1.113 penerima saja. Hal ini disebabkan oleh banyaknya KPM yang meninggal namun belum terhapus dari DTKS dan KPM pindah tempat tinggal.

REFERENSI

- Abdul Aziz, G., Rochaida, E., & Warsilan. (2016). Faktor Faktor Uang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen*, 12(1), 29–48. <http://journal.feb.unmul.ac.id>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fahurrahman, M. (2016). Faktor Birokrasi Dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal TARBAWI*, 2(02), 14–27. <https://media.neliti.com/media/publications/256485-faktor-birokrasi-dalam-keberhasilan-impl-6defc895.pdf>
- Fikar, Z. P., & Suriaman. (2022). Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila Dikalangan Generasi Muda Guna Menghadapi Ancaman Radikalisme di Era Glabalisasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa*, 1(2), 93–100. <https://doi.org/10.55927/jpmf.v1i2.502>
- Ismanto, A. (2023). Tekan Angka Kemiskinan, Pemkab Gresik Perluas Cakupan Bansos Untuk Lansia dan Difabel. *Inews Gresik*. <https://gresik.inews.id/read/311142/tekan-angka-kemiskinan-pemkab-gresik-perluas-cakupan-bansos-untuk-lansia-dan-difabel>
- Kabupaten Gresik. (2022). *Bupati Gresik Didampingi Kadinsos Salurkan Bantuan PKH Inklusif Kepada Warga Kecamatan Bungah*. <https://www.gresikkab.go.id/berita/894-bupati-gresik-didampingi-kadinsos-salurkan-bantuan-pkh-inklusif-kepada-warga-kecamatan-bungah>
- Melis, M. (2019). Relevansi Agama dan Kemiskinan; Upaya Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional dan Solusi yang Ditawarkan dalam Ekonomi Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(2), 179–190. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.11227>
- Mustain. (2022, November). Mengenal PKH Inklusif, Program Terobosan Pemkab Gresik. *Pdiperjuangan-Jatim.Com*, Mengenal PKH Inklusif, Program Terobosan Pemkab Gr. <https://pdiperjuangan-jatim.com/mengenal-program-pkh-inklusif-pemkab-gresik/>
- PERATURAN BUPATI GRESIK JAWA TIMUR. (2022). *Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Program Keluarga Harapan Inklusif Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Gresik* (pp. 1–14).
- Ramly, A., & Syaban, A. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Bidang Pendidikan di Desa Langkumapo Kecamatan Napabalan Kabupaten Muna. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 7373–7386. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4623>
- Setiono, D. A. (2022, November 9). PKH Inklusif Sasar Lansia dan Disabilitas yang Belum Dapat Bantuan. *Beritajatim.Com*, PKH Inklusif Sasar Lansia dan Disabilitas yang Bel. <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/pkh-inklusif-sasar-lansia-dan-disabilitas-yang-belum-dapat-bantuan/>
- Susanti, G., Abdullah, M. T., & Pauzi, R. (2023). Evaluasi Dampak Program: Studi Kasus Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Enrekang. *Development Policy and* <http://journal.unhas.ac.id/index.php/DPMR/article/view/26674>
- Yusnafira, A. V., Fitrianti, R., & Nursini. (2023). *Analisis Kemiskinan Kabupaten Bone*. 8(2), 25–35.